

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja Keuangan

2.1.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha memiliki pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dalam indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2018).

Menurut Fahmi (2018) kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan bisa diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan ialah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Kemudian menurut Rudianto (2019) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya yaitu mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian terkait kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan yaitu penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi serta karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2.1.1.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2018) terdapat empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan yakni sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan ketika ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud yaitu mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka Panjang.
3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama priode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan pada saat menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.

2.1.2. Value For Money

2.1.2.1. Pengertian Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis yaitu perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum menggunakan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efesiensi yaitu perbandingan *output* atau input yang dikaitkan dengan standar target yang telah ditetapkan. Efektifitas yaitu tingkat atau tarif pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas yaitu perbandingan *outcome* dengan *output*.

Menurut Mahmudin (2021) mendefinisikan *value for money* sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah wajib dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan dan sektor publik. Kinerja pemerintahan tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, *output*, dan *outcome* secara bersama sehingga benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya.

2.1.2.2. Indikator *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018) indikator adalah *value for money* dibagi menjadi dua bagian yaitu indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Indikator ekonomis dan efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (seperti staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang di hasilkan. Sedangkan indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program pada saat mencapai tujuan program.

Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian dilain pihak semua program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan. Akan tetapi mungkin dicapai menggunakan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Suatu program efektif dan efisien maka program yang dijalankan dapat dikatakan *cost effectiveness*. Indikator efektifitas biaya yaitu kombinasi informasi efisiensi dan efektifitas dan dapat memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik diidentifikasi dengan pelayanan publik.

2.1.2.3. *Value For Money* dalam Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Konflik yang sering muncul yaitu sulitnya mengukur *output* karena *output* yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa *output* yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (*intangible output*). Pengukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Menurut Mardiasmo (2018) indikator kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan metode *value for money* yang terdiri dari sebagai berikut.

1. Ekonomis

Ekonomis terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya agar dapat memperoleh unit input. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis ekonomis ialah perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk dapat memperoleh input tersebut. Ekonomis merupakan konsep yang sifatnya relatif. Relatifitas konsep ekonomi tersebut bisa disebabkan oleh faktor lokasi dan waktu kedua faktor tersebut terkait dengan harga pasar yang berbeda. Harga pasar untuk input yang sama bisa berbeda sebab waktu dan lokasi yang berbeda.

2. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Secara matematis, efisiensi ialah perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi program atau aktivitas kegiatan dikatakan efisien jika mampu memperoleh menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

3. Efektifitas

Efektifitas (hasil guna) adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target sasaran kebijakan. Aktivitas kegiatan operasional dikatakan efektif jika proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektifitas terkait dengan korelasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Semakin tinggi atau kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau aktivitas kegiatannya. Apabila ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada input atau proses, maka efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program

atau kegiatan dinilai efektif jika *output* yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

2.1.3. Dampak Pandemi Covid-19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* merupakan virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona mampu menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus Corona bisa disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat serta menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam kurung waktu beberapa bulan. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara memberlakukan kebijakan *lockdown* untuk mencegah virus Corona makin meluas. Kemudian di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) agar menekan penyebaran virus ini. Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) supaya menekan penyebaran virus ini. Namun, saat ini kebijakan PPKM sudah dilonggarkan menjadi PPKM level 1 pada sejumlah wilayah, contohnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Adanya pandemi Covid-19 sebagai tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara akuntabel. Analisis keuangan merupakan penggunaan data laporan keuangan untuk menganalisis status dan kinerja keuangan, serta untuk mengukur kinerja keuangan di masa mendatang. Dampak pandemi Covid-19 diperkirakan juga dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau. Disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang didalamnya diatur mengenai pembatasan kegiatan namun tetap harus mempertimbangkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan terbatasnya gerak masyarakat pada tahun 2020 maka pergerakan perekonomian pun terlihat stagnan, hal ini tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tercatat dari laporan BPS bahwa PDB atas dasar

harga berlaku pada tahun 2020 sebesar RP15.434,2 triliun dan PDB per kapita sebesar RP56,9 juta atau US\$3.911,7. Tercatat bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi yang turun tersebut terlihat tidak sejalan jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah tahun 2020.

2.2. Kajian Empiris

Penelitian ini membutuhkan pengamatan dari penelitian-penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai perbandingan. Hasil dari penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Liando dkk (2018) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan *Metode Value For Money*”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dari segi ekonomis pemerintahan kabupaten kepulauan Sangie dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisien harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi, dari segi efektifitas dapat diperbaiki dengan upaya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Putri (2021) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Menggunakan Metode *Value For Money*”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dari segi rasio ekonomis pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa bersifat ekonomis dan kinerja yang bernilai rata-rata di bawah 100%. Rasio efisiensi pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015-2019 menunjukkan bahwa rasio ini bernilai tidak efisien. Rasio efektifitas pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015 dan 2018 menunjukkan kinerja yang efektif. Pada tahun 2016, 2017, 2019 kinerjanya tidak efisien. Sementara rata-rata rasio dari tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa rasio ini bernilai efektif.

3. Nugrahani (2017) dengan judul penelitian “Anaisis Penerapan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran provinsi DIY dengan menggunakan konsep *value for money*, kinerja keuangan pemda DIY cukup ekonomis dan efisien tetapi kurang efektif.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan metode *value for money* adalah cara yang tepat dalam melihat kinerja keuangan dari instansi yang bergerak di sektor publik. Metode *value for money* merupakan satu langkah yang bagus untuk instansi yang bergerak di sektor publik dalam mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Metode *value for money* dapat mengetahui tinggi atau rendahnya kinerja keuangan yang dapat dilihat dari segi ekonomis, segi efektifitas, dan dari segi efisiensi.

Tabel 2.1
Kajian Empiris

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Liando dkk (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> .	Deskriptif kuantitatif.	Segi ekonomis pemerintahan kabupaten kepulauan Sangiedalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisien harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi, dari segi efektifitas dapat diperbaiki dengan upaya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.	Kurrohmaan (2020)	Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis <i>Value For Money</i> di	Deskriptif kualitatif.	Pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

		Kabupaten/Kota Jawa Timur.		
3.	Nugrahani (2017)	Analisis Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Deskriptif kualitatif.	Berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran provinsi DIY dengan menggunakan konsep <i>value for money</i> , kinerja keuangan pemda DIY cukup ekonomis dan efisien tetapi kurang efektif.
4.	Nazril (2019)	Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar.	Deskriptif kuantitatif.	Pelayanan rumah sakit Umum Daerah Labuang Bji Kota Makassar telah memenuhi prinsip <i>value for money</i> , yaitu ekonomis, efisien, dan efektifitas. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis kuisioner yang disebarkan kepada pelanggan.
5.	Putri (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Menggunakan Metode <i>Value For Money</i>	Deskriptif kuantitatif.	Rasio ekonomis pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa bersifat ekonomis dan kinerja yang bernilai rata-rata di bawah 100%. Rasio efisiensi pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015-2019 menunjukkan bahwa rasio ini bernilai tidak efisien. Rasio efektifitas pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015 dan 2018 menunjukkan kinerja yang efektif. Pada tahun 2016, 2017, 2019 kinerjanya tidak efisien. Sementara rata-rata rasio dari tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa rasio ini bernilai efektif.
6.	Putra (2014)	Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> dalam Menilai	Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran Polres

		Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir.		Ogan Ilir bagian SIM tahun 2011 sampai 2013, maka <i>value for money</i> pada Polres Ogan Ilir sudah cukup baik karena Polres Ogan Ilir sudah memenuhi 2 elemen <i>value for money</i> yaitu ekonomis dan efisien meskipun pada elemen efektif tidak efektif.
7.	Sari (2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip <i>Value For Money</i> (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013).	Deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010- 2013, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 88,02 %, 89,98 %, 89,77 % dan 90,68%. Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, 95,36%, 92,91% dan berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif hanya sebesar 99,95 % dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 100,84 %, 101,21 % dan 101, 28 % dan berada pada kategori efektif
8.	Sulastiningsih (2015)	Pengukuran Kinerja Berbasis <i>Value For Money</i> Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara.	Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan tabel kriteria ekonomis kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis. Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan

				nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel di atas terkait penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan rujukan dalam melakukan penelitian ini. Pada setiap penelitian terdahulu tentunya memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Liando, dkk (2018) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value For Money*”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi tempat. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Liando, dkk dilakukan di Kepulauan Sangihe, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekadau. Objek yang dilakukan oleh Liando, dkk dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Liando, dkk dilakukan pada tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Metode analisis yang digunakan oleh Liando, dkk adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian untuk persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kinerja keuangan daerah dengan metode *value for money*.
2. Kurrohman (2020) dengan judul penelitian “Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis *Value For Money* di Kabupaten/Kota Jawa Timur”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi tempat. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Kurrohman dilakukan di Jawa Timur, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekadau. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Kurrohman dilakukan pada tahun 2020, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Kemudian untuk persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kinerja keuangan daerah dengan metode *value for money* dengan sama-sama meneliti objek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Nugrahani (2017) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan konsep *value for money*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi tempat. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dilakukan di daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekadau. Objek yang dilakukan oleh Nugrahani dilakukan di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dilakukan pada tahun 2017, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Kemudian untuk persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kinerja keuangan daerah dengan metode *value for money* dengan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.
4. Nazril (2019) dengan judul penelitian “Penerapan Konsep *Value For Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi tempat. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Nazril dilakukan di Kota Makassar, sedangkan

pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekadau. Objek yang dilakukan oleh Nazril dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Nazril dilakukan pada tahun 2019, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Metode analisis yang digunakan oleh Nazril adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian untuk persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kinerja keuangan daerah dengan metode *value for money*.

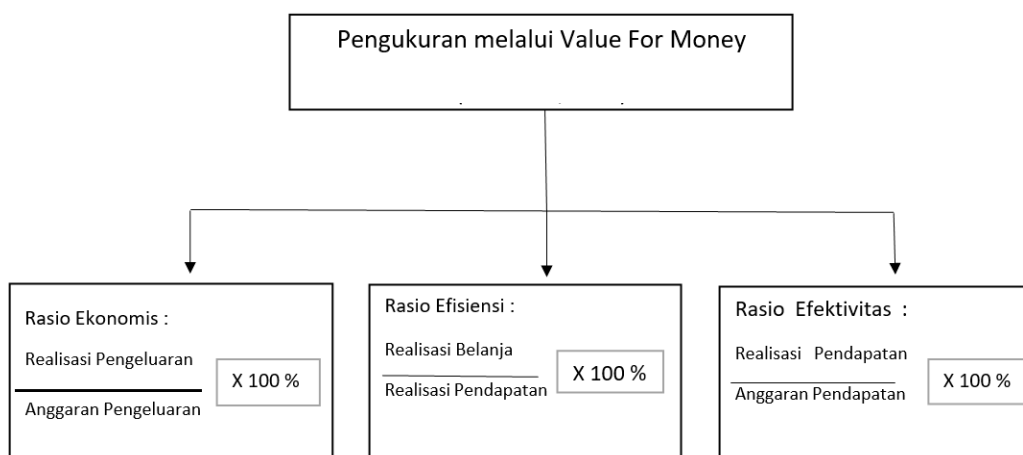
5. Putri (2021) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Menggunakan Metode *Value For Money*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dengan menggunakan metode *value for money*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi tempat. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Putri dilakukan di Kabupaten Ketapang, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekadau. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Putri dilakukan pada tahun 2021, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Kemudian untuk persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kinerja keuangan daerah dengan metode *value for money* dengan sama-sama meneliti objek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.
6. Putra (2014) dengan judul penelitian “Penerapan Konsep *Value For Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi tempat. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Putra dilakukan di Polres Ogan Ilir, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekadau. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Putra dilakukan pada tahun 2014,

sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Kemudian untuk persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kinerja keuangan dengan metode *value for money* serta sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

7. Sari (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip *value for money*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi tempat. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Sari dilakukan di Kabupaten Sumenep, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekadau. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Sari dilakukan pada tahun 2014, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Metode analisis yang digunakan oleh Sari adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian untuk persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kinerja keuangan daerah dengan metode *value for money* dengan sama-sama meneliti objek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
8. Sulastiningsih (2021) dengan judul penelitian “Pengukuran Kinerja Berbasis *Value For Money* Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi tempat. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih dilakukan di SMP Negeri 2 Banjarnegara, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekadau. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih dilakukan pada tahun 2021, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Kemudian untuk persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kinerja keuangan dengan metode *value for money* dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan dari kerangka konseptual penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mengukur kinerja keuangan sebuah instansi khususnya instansi sektor publik dapat dilakukan dengan berbagai metode salah satu dengan metode *value for money*. Adapun indikator yang terdapat dalam metode *value for money* terdiri dari rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas.